

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno.2007.Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful.2015.Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh.2010.Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusamedia.
- Salman Luthan.2011.Mediasi Penal: Dalam Sistem Peradilan Pidana, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda.2010.Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.
- Hatta, Moh.2016.Kapita Selekt Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syahrums, Muhammad.2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Peneliti-an Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Mahmud Marzuki, Peter.2016. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Diantha, I Made Pasek.2017. Metode Penelitian Hukum normatif, Jakarta: Kencana.
- Syamsudin, M.2021. Mahir Meneliti Masalah Hukum, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono.2018.Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth.2018.Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Prs.
- Ibrahim Jhonny.2006.Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Malang: Banyudia Publishing.
- Mulyadi, Lilik. 2022. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni.
- Lesmana, CSA Teddy. 2020. Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Banyumas: CV Pena Persada.

- Marc Ancel. 1965. *Social Defefencnce, A Modern Approach to Crimiminal Problelems*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Soerjono, Soekanto. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Clarence J. Diaz, dalam Febrina. 2000. "Impact of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia)", Surabaya, Seminar Internasional Disaster Management.
- M. Friedmann Lawrence, and Stewart Macalalay. 1969. "Law and Behavioral", New York: Company INC Publisher.
- Suyono. 1996. "Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Peter J.P. 1986. Task, The Legal Scope of Non Presecution in Europe, Publication Series , Helsinki: Institute for Crime Prevention an Control Affiliated with the United Nations.
- Andi Hamzah.1980. Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fatilah A. Syukur. 2011. Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishing.
- Mulyadi, L.2014. Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Waluyo, B. 2016. *Desain fungsi Kejaksaan pada restorative justice*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Prasetyo, T.2010. Hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhtaj El Majda.2007. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Prenada Media Group.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur.2011.Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie-Publishing.
- Hamzah Andi.2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Jurnal

- Ismi Anandita, Erdianto, dan Rahmat Hendra, *Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat*, *Kampar, JOM Fakultas Hukum*, 3, No. 1 (2016). Diakses hari Rabu, 9 Oktober 2024, jam 10:46WIB.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Skripsi, Fakul-tas Hukum Universitas Indonesia, 1993. Diakses hari Rabu, 9 Oktober 2024, jam 12:28WIB.

- Muhammad Taufiq et al, *Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Media Hukum 24, No. 2 (2018). Diakses hari Rabu, 9 Oktober 2024, jam 14:04 WIB.
- Muhammad Hafidz Ulin Nuha, "*Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penncurian Di Pondok Pesantren Darul Fatah Tumbal Purwodadi*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024. Diakses hari Rabu, 9 Oktober 2024, jam 14:38 WIB.
- Yudy Hari Pratama, "*Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri alisongo Semarang, 2020. Diakses hari Rabu, 9 Oktober 2024, jam 15:13 WIB.
- Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, Jurnal Media Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013. Diakses hari Kamis, 10 Oktober 2024, jam 11:14 WIB.
- Tiara Julianti Dwi Saputra, (2023) "*Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Diakses hari Kamis, 10 Oktober 2024, jam 14:55 WIB.
- Wahyu Wibowo, (2017) "*Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Untuk Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polres Pemplang)* ", Skripsi Fdakultas Hukum Unniversitas Sultan Agung, sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en_%5B1%5D.doc. Diakses hari Senin, 11 November 2024, jam 07.11 WIB.
- Annemieke Wolthuis, "Will Mediation in Penal Matters be mandatory The Impact of International Standards", fp.enter.net/restorativepractices/MediationMandatory Di Akses hari Senin, 11 November 2024, jam 11.02 WIB.
- Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 1 Diakses pada hari Rabu, 27 November 2024, jam 09:38 WIB.
- Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hal. 8-9. Diakses pada hari Rabu, 27 November 2024, jam 10:03 WIB.
- Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Rechtvindig*, hal. 1–7. Diakses pada hari Rabu, 27 November 2024, jam 11:11 WIB.

- Kurniawan, I. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education And Development*, 10(1), 610–618. Diakses pada hari Kamis, 28 November 2024, jam 20:37WIB.
- Fahik, A. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 240–245. Diakses pada hari Sabtu, 30 November 2024, jam 07:51WIB.
- Muhammad Arif Setiawan, (2022). Arrest and Detention in Indonesian Criminal Procedure Code under Human Rights Perspective, *Sinomics Journal: International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 1, no. 2 (2022): 153–62. Diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, jam 07:09WIB.
- Pricilia Ina Sura Mado, (2023) Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Hukum Online* 1. 2 (2023): 2442–3084. Diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, jam 08.17WIB.
- Johari, (2023) Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* . 1, no. 1 : 65–77, Diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, jam 14:09WIB.
- Hasan, (2019) Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/2019/PN Bna). Diakses pada hari Rabu 4 Desember 2024, jam 08:11WIB.
- Gede Widhiana Suarda, (2021) Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial System in Indonesia, *Junal Law Review* 11, no.8–31. Diakses pada hari Rabu 4 Desember 2024, jam 09:14WIB.
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M. Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press. Diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2024, jam 07:22WIB.
- Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum. Diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2024, jam 08:47WIB.

- Mahendra, Adam Prima,(2020) “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), hal. 1153–1178. Diakses pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, jam 08:07WIB.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: *Jurnal Hukum*, 10 (2), 173–190 . Diakses pada hari Jumat,6 Desember jam 16:36WIB.
- Karmilia, R.(2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 1–9. Diakses pada hari Sabtu, 7 Desember jam 09:06WIB.
- Utomo, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana*, Cianjur, 5(01). Diakses pada hari Minggu, 8 Desember 2024, jam 13:41WIB.
- Sari, N. M., & Budiana, I. N.(2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1324–1331. Diakses pada hari Senin 9 Desember 2024, jam 07:02WIB.
- Kristanto, A.(2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), hal. 180–193. Diakses pada hari Senin, 9 Desember 2024, jam 08:24WIB.
- Sudira, I. K.(2020). Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi. UII Press. Diakses pada hari Senin, 9 Desember 2024, jam 14:59WIB.
- Parasdika, A.(2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. *Journal of Criminal*, v. 3 no. 1, 2022. Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2024, jam 07:25WIB.
- Wakkary, R. S.(2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10 (9). Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2024, jam 08:56WIB.
- Lazuardi, G.(2021). Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9). Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2024, jam 10:25WIB.

Yustika, P. M., & Jainah, Z. O.(2023). *Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan*: Universitas Bandar Lampung. *Yustisi*, 10(1). Diakses pada hari Jumat,13 Desember 08:04WIB.

Arief, B. N.(2006). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2006, hal. 42. Diakses pada hari Minggu 15 Desember 2024, jam 19:19WIB.

Sefriani, (2013)“Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restorative di Indoensia”, *Jurnal Rechvinding*, Volume 2 No. 2. Diakses pada hari Rabu, 18 Desember jam 19:02WIB.

Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/> .Diakses hari Jumat, 11 Oktober 2024 jam 10:50WIB.

[Annemieke Wolthuis, Will Mediation in Penal Matters be mandatory? The Impact ofInternationalStandards,fp.enter.net/restorativepractices/MediationMandatory](https://fp.enter.net/restorativepractices/MediationMandatory). Diakses Hari Jumat 15 November jam 08:22WIB.

Lihat antara lain,Deborah Macfarlane,e, Victim Offefender Mediation in France , http://www.Mediationconference.com.au/2006_Papers/Deborah%20Macfarlane%20%20VICTIM%20OFFENDER_%20MEDIATION%20IN%20FRANCE1.doc ;Christa Pelikan. On Restorative Justice, www.restorativejustice.org/resources/docs/pelikan;Dieter Rössner,Mediation as a Basic Element of Crime Control. Diakses Hari Selasa 19 November jam 09.0WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyaknapi-narkotika/> . Diakses pada hari Sabtu,23 november 2024 jam 09:10WIB.

<https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>. Di Akses pada hari Sabtu, 23 november 2024 jam 10:20WIB.

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country>. Diakses pada hari Sabtu, 23 November jam 15:22WIB.

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> Diakses pada hari Selasa 16 Desember jam 08:12WIB.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 591 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Tindak Pidana Penadahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penulis telah melakukan wawancara kepada Jaksa Reza Fikri Muhammad S.H. selaku Kasubsi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Tegal.